



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 45A TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 25 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.
4. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
5. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi perangkat daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan serta sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran;

- c. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 12 Desember 2013

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR 45A

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

URUSAN WAJIB

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FAKTOR PENGALI	KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	RUMUSAN OPERASIONAL		
1. URUSAN: PENDIDIKAN				
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Untuk mengukur jumlah siswa pada TK/ Ra/ Penitipan Anak dibanding jumlah anak usia 4-6 tahun $\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK/ RA/ Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak usia 4-6 tahun}} \times 100\%$	x 100%	
2.	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Untuk mengukur jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas yang dapat baca tulis $\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 thn ke atas yang dapat baca tulis}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 thn ke atas}} \times 100\%$	x 100%	
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) pada seluruh jenjang pendidikan	Untuk mengukur jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan dibanding jumlah penduduk di kelompok usia sekolahnya Pada jenjang SD/ MI/ Paket A $\frac{\text{Jumlah siswa dijenjang SD/MI/ Paket A}}{\text{Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 thn}} \times 100\%$	x 100%	
		Pada jenjang SMP/ MTs/ Paket B $\frac{\text{Jumlah siswa dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn}} \times 100\%$	x 100%	
		Pada jenjang SMA/SMK/MA/ Paket C $\frac{\text{Jumlah siswa dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn}} \times 100\%$	x 100%	
4.	Angka partisipasi murni (APM) pada seluruh jenjang pendidikan	untuk mengukur jumlah siswa sesuai kelompok usia sekolahnya pada setiap jenjang pendidikan dibanding jumlah penduduk di kelompok usia sekolahnya Pada jenjang SD/ MI/ Paket A $\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12thn dijenjang SD/MI/ Paket A}}{\text{Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 thn}} \times 100\%$	x 100%	
		Pada jenjang SMP/ MTs/ Paket B $\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn}} \times 100\%$	x 100%	
		Pada jenjang SMA/SMK/MA/ Paket C $\frac{\text{Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn}} \times 100\%$	x 100%	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FAKTOR PENGALI	KETERANGAN	
	URAIAN INDIKATOR	RUMUSAN OPERASIONAL			
5.	Angka Putus Sekolah (APTS) pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/ SMK/MA	Untuk mengukur jumlah siswa yang putus sekolahnya pada setiap jenjang pendidikan Pada jenjang SD/ MI Paket A $\frac{\text{Jumlah putus sekolah pada tingkat \& jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa pada tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya}}$	x 100%		
		Pada jenjang SMP/ MTs/ Paket B $\frac{\text{Jumlah putus sekolah pada tingkat \& jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa pada tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs pd tahun ajaran sebelumnya}}$			x 100%
		Pada jenjang SMA/SMK/MA/ Paket C $\frac{\text{Jumlah putus sekolah pada tingkat \& jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa pada tingkat yg sama dan jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya}}$			x 100%
6.	Angka kelulusan (AL) pada jenjang SD/MI, SMP/MTS, dan SMA, SMK/ MA	Untuk mengukur tingkat penyelesaian pendidikan siswa pada tingkat tertinggi pada setiap jenjang pendidikan Pada jenjang SD/ MI/ Paket A $\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya}}$	x 100%		
		Pada jenjang SMP/ MTs/ Paket B $\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada SMP/MTs pd tahun ajaran sebelumnya}}$			x 100%
		Pada jenjang SMA/SMK/MA/ Paket C $\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya}}$			x 100%
7.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Untuk mengukur siswa SD/MI pada tingkat tertinggi yang melanjutkan sekolah pada jenjang SMP/MTs $\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTS tahun ajaran sebelumnya}}$	x 100%		
8.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Untuk mengukur siswa SMP/MTs pada tingkat tertinggi yang melanjutkan sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA $\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA tahun ajaran sebelumnya}}$	x 100%		
9.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Untuk mengukur ketersediaan guru pada jenjang seluruh jenjang pendidikan yang telah S1/ D-4 $\frac{\text{Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jumlah Guru SD/ MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA}}$	x 100%		
10.	Rata - rata nilai UN SD/ MI	Untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pendidikan jenjang SD/MI melalui nilai UN $\frac{\text{Jumlah nilai rata-rata hasil UN seluruh sekolah SD/MI}}{\text{Jumlah seluruh SD/MI peserta UN}}$			
11.	Rata - rata nilai UN SMP/MTs	Untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pendidikan jenjang SMP/MTs melalui UN $\frac{\text{Jumlah nilai rata-rata hasil UN seluruh sekolah SD/MI}}{\text{Jumlah seluruh SD/MI peserta UN}}$			

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FAKTOR PENGALI	KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	RUMUSAN OPERASIONAL		
12.	Rata - rata nilai UN SMA/SMK/ MA	Untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pendidikan jenjang SMA/SMK/MA melalui UN $\frac{\text{Jumlah nilai rata-rata hasil UN seluruh sekolah SD/MI}}{\text{Jumlah seluruh SD/MI peserta UN}}$		
13.	Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik	untuk mengukur ketersediaan pendidik pada jenjang seluruh jenjang pendidikan yang telah memiliki sertifikat pendidik $\frac{\text{Jumlah Pendidik Yang Bersertifikat Pendidik}}{\text{Jumlah Seluruh Pendidik}}$	x 100%	
14.	Ruang kelas yang kondisinya baik untuk SD/MI, SMP/MTS, dan	untuk mengukur ruang kelas yang kondisinya baik untuk jenjang pendidikan SD/MI $\frac{\text{jumlah ruang kelas yang kondisinya baik}}{\text{jumalh ruang kelas yang ada}}$	x 100%	
		untuk mengukur ruang kelas yang kondisinya baik untuk jenjang pendidikan SMP/MTS $\frac{\text{jumlah ruang kelas yang kondisinya baik}}{\text{jumalh ruang kelas yang ada}}$	x 100%	
		untuk mengukur ruang kelas yang kondisinya baik untuk jenjang pendidikan SMK/MA $\frac{\text{jumlah ruang kelas yang kondisinya baik}}{\text{jumalh ruang kelas yang ada}}$	x 100%	
2. URUSAN: KESEHATAN				
1	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	Adalah cakupan Ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali $\frac{\text{Jumlah Ibu Hamil yg memperoleh pelayanan antenatal K4 sesuai standart oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di satu wil. kerja dalam kurun waktu yang sama}}$	x 100%	
2	Cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani	Adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan $\frac{\text{Jumlah Komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jml Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}}$	x 100%	
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	Adalah Ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. $\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama}}$	x 100%	
4	Cakupan Pelayanan Nifas	Adalah pelayanan kepada ibu pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar $\frac{\text{Jumlah ibu nifas yg telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Seluruh Ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama}}$	x 100%	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FAKTOR PENGALI	KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	RUMUSAN OPERASIONAL		
5	Cakupan Neonatal dgn komplikasi yang ditangani	adalah neonatal dengan komplikasi disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan.	x 100%	
		<i>Jumlah neonatal dengan komplikasi yang tertangani</i>		
		<i>Jumlah seluruh neonatal dengan komplikasi yang ada</i>		
6	Cakupan Kunjungan bayi	Adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 7 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.	x 100%	
		<i>Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar paling sedikit 7 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu</i>		
		<i>Jumlah seluruh sasaran bayi disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama</i>		
7	Desa /Kelurahan UCI	adalah Desa/Kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.	x 100%	
		<i>Jumlah desa / kelurahan UCI</i>		
		<i>Seluruh desa / kelurahan</i>		
8	Cakupan Pelayanan anak balita	adalah anak balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan sesuai standar	x 100%	
		<i>Jml anak balita yg memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu</i>		
		<i>Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yg sama</i>		
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI	adalah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 Bulan dari keluarga miskin selama 90 hari.	x 100%	
		<i>Jumlah anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin yg mendapat MP - ASI</i>		
		<i>Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin</i>		
10	Cakupan Balita gizi buruk	adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.	x 100%	
		<i>Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu</i>		
		<i>Jumlah seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama</i>		
11	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD & setingkat	adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan dan tenaga terlatih (guru UKS / dokter kecil) melalui penjangkaran kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.	x 100%	
		<i>Jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat yg diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan bersama tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu</i>		
		<i>Jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama</i>		
12	Cakupan peserta KB aktif	adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	x 100%	
		<i>Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu</i>		
		<i>seluruh Pasangan Usia Subur di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama</i>		

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FAKTOR PENGALI	KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	RUMUSAN OPERASIONAL		
13	Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit			
	a Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan dan dilaporkan ≥ 2 diantara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu. <i>Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan</i>		
	b Cakupan balita dengan Pneumonia yg ditangani	Persentase balita dengan Pneumonia yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar di Sarana Kesehatan di satu wilayah dalam waktu satu tahun. <i>Jumlah penderita pnemunonia balita yang ditangani sesuai standar disatu wilayah kerja pd kurun waktu satu tahun</i> <i>Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita di satu Wilayah kerja pada kurun waktu yg sama</i>	x 100%	
	c Angka penemuan pasien baru TB BTA positif	Angka penemuan pasien baru TB BTA positif atau Case Detection Rate (CDR) adalah persentase jumlah penderita baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati (form TB 07) dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. <i>Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun</i> <i>Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif dalam satu wilayah dalam waktu satu tahun</i>	x 100%	
	d Penderita DBD yang ditangani	Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. <i>Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah dalam waktu satu tahun</i> <i>umlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama</i>	x 100%	
	e Penderita diare yang ditangani	Penemuan penderita diare adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani di Sarana Kesehatan dan Kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. <i>Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana Kesehatan dan Kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.</i> <i>Jumlah perkiraan penderita diare pd satu wilayah tertentu dalam waktu yg sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)</i>	x 100%	
14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar maskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan baru dan lama masyarakat miskin di wilayah kerja Puskesmas dan jaringannya pada kurun waktu tertentu <i>Jumlah kunjungan baru dan lama maskin di sarana kesehatan strata pertama</i> <i>jumlah seluruh maskin (kuota dan non kuota) di kab/kota</i>	x 100%	
15	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Cakupan rujukan pasien maskin adalah jumlah rujukan pasien maskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama dan baru) <i>Jumlah pasien rujukan maskin di sarkes strata 2 dan strata 3</i> <i>Angka rujukan (1,5 %) x jumlah masyarakat miskin</i>	x 100%	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FAKTOR PENGALI	KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	RUMUSAN OPERASIONAL		
16	Prosentase masyarakat miskin yang terkoper jaminan pelayanan kesehatan (semua jaminan kesehatan)	Adalah jumlah cakupan masyarakat miskin yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan (Jamkesmas, Jamkesdas) <u>Jumlah masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan</u> <u>jumlah masyarakat miskin di kab. Pamekasan</u>	x 100%	
17	Pelayanan gawat darurat level 1	Pelayanan gawat darurat level 1 yg hrs diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/Kota. <u>Jumlah RS yang mampu memberikan pelayanan gawat darurat level 1</u> <u>Jumlah RS kab/kota</u>	x 100%	
18	Cakupan KLB Desa/ kelurahan yang ditangani < 24 jam	Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam adalah Desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam oleh Kab/Kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu. <u>Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani <24 jam dalam periode tertentu</u> <u>Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama</u>	x 100%	
18	Cakupan Desa Siaga Aktif	Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang telah berfungsi dan berada pada tahap tumbuh, kembang dan paripurna dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk <u>Jumlah Desa siaga yang aktif</u> <u>Jumlah Desa Siaga yang dibentuk</u>	x 100%	
19	Akses Rumah Tangga terhadap sanitasi dasar	Adalah jumlah Rumah Tangga yang sudah terpenuhi sarana air bersih, jamban keluarga, sarana pembuangan air limbah dan sarana pembuangan sampah secara sehat <u>Jumlah Rumah Tangga yang akses terhadap sanitasi dasar</u> <u>Jumlah Rumah Tangga di Wilayah Kab. Pamekasan</u>	x 100%	
3. URUSAN: KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH				
1	BOR (Bed Occupation Rate)	adalah Persentase penggunaan tempat tidur pasien <u>Jumlah hari perawatan RS</u> <u>Jumlah TT x Jumlah hari dalam setahun (360)</u>	x 100%	
2	TOI (Turn of Internal)	Jarak penggunaan TT sampai digunakan kembali <u>(Jumlah TT x periode)- Hari perawatan</u> <u>Jumlah pasien keluar (Hidup+Mati)</u>	x 100%	
3	ALOS (Average long of stay)	Adalah untuk menghitung jumlah perawatan pasien <u>Jumlah lama dirawat</u> <u>Jumlah pasien keluar (Hidup + Mati)</u>	x 100%	
4	NDR (Net date rate)	Jumlahangka kematian 48 jam setelah dirawat <u>Jumlah pasien mati > 48 jam</u> <u>Jumlah Total Pasien keluar</u>	x 100%	
5	GDR (Grade date rate)	Jumlah kematian keseluruhan <u>Jumlah Pasien mati</u> <u>Jumlah Total Pasien keluar</u>	x 100%	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FAKTOR PENGALI	KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	RUMUSAN OPERASIONAL		
6	CRR (Cost recovery rate)	adalah untuk mengetahui rata-rata jumlah kasus yang terjadi $\frac{\text{Jumlah kasus}}{\text{Jumlah Total Kunjungan}}$	x 100%	
7	Persediaan Alat Kesehatan	Untuk mengetahui jumlah alat kesehatan rumah sakit type b non pendidikan $\frac{\text{Jumlah alkes di Rumah Sakit}}{\text{Jumlah alkes sesuai Permenkes untuk Rumah Sakit type B Non Pendidikan}}$	x 100%	
8	Tempat Tidur RS sesuai permenkes	Adalah untuk mengetahui jumlah TT di Rumah Sakit apakah sudah memenuhi standart permenkes $\frac{\text{Jumlah TT di RS}}{\text{Jumlah TT sesuai Permenkes untuk Rumah Sakit type B Non Pendidikan}}$	x 100%	
9	Kelayakan Ruangan Pelayanan RS	Untuk mengetahui bangunan ruangan pelayanan di RS apakah sudah sesuai standart $\frac{\text{Luas dan Bentuk Ruangan Rumah Sakit}}{\text{Luas dan Bentuk Ruangan Rumah Sakit type B sesuai Permenkes}}$	x 100%	
10	Kalibrasi Alat Kesehatan dan Alat Laboratorium	Kalibrasi adalah pengujian kembali terhadap kelayakan peralatan laboratorium oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) $\frac{\text{Jumlah seluruh alat kesehatan dan alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah alat kesehatan dan alat laboratorium yang perlu dikalibrasi dalam 1 tahun}}$	x 100%	
11	Baku mutu limbah cair	Baku mutu adalah standar minimal pada limbah cair yang dianggap aman bagi kesehatan yang merupakan ambang batas yang ditolerir dan diukur dengan indikator : BOD (biological Oxygen Demand) : 30 mg/liter COD (Chemical Oxygen Demand) : 80 mg/liter TSS (Total suspended solid) 30 mg/liter PH : 6-9 $\frac{\text{Hasil laboratorium pemeriksaan limbah cair rumah sakit yang sesuai dengan baku mutu}}{\text{Jumlah seluruh pemeriksaan limbah cair}}$	x 100%	
12	Kejadian kematian ibu karena persalinan	Kematian ibu melahirkan yang disebabkan karena perdarahan, pre eklamsia, eklamsia, partus lama dan sepsis Perdarahan adalah perdarahan yang terjadi pada saat kehamilan semua skala persalinan dan nifas pre-eklamsia dan eklampsia mulai terjadi pada kehamilan trimester kedua, pre eklampsia dan eklampsia merupakan kumpulan dari dua dari tiga tanda yaitu : - Tekanan darah sistolik > 160 mmHg dan diastolik > 110 mmHg - Protein uria > 5 gr/24 jam 3+/- pada pemeriksaan kualitatif - Oedem tungkai Eklampsia adalah tanda pre-eklampsia yang disertai dengan kejang dan atau penurunan kesadaran Sepsis adalah tanda-tanda sepsis yang terjadi akibat penanganan abortus, persalinan dan nifas yang tidak ditangani dengan tepat oleh pasien atau penolong. $\frac{\text{Jumlah kematian pasien persalinan karena perdarahan, pre-eklampsia/eklampsia dan sepsis}}{\text{Jumlah pasien-pasien persalinan dengan perdarahan, pre-eklampsia/eklampsia dan sepsis}}$	x 100%	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FAKTOR PENGALI	KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	RUMUSAN OPERASIONAL		
13	Persentase penduduk yang memanfaatkan RSUD	Adalah untuk mengetahui jumlah Persentase penduduk yang memanfaatkan RSUD $\frac{\text{Jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan}}{\text{Jumlah seluruh penduduk}} \times 100\%$	x 100%	
14	Persentase penduduk miskin yang terlayani oleh RSUD	Adalah untuk mengetahui jumlah Persentase penduduk miskin yang sudah terlayani oleh RSUD $\frac{\text{Jumlah pasien yang mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah}}{\text{Jumlah seluruh penduduk miskin}} \times 100\%$	x 100%	
3. URUSAN: LINGKUNGAN HIDUP				
1	Persentase perusahaan yang memiliki Dokumen (HO, UKL/UPL, AMDAL) dan Ijin Lingkungan	Untuk mengukur Persentase perusahaan yang memiliki Dokumen Lingkungan dan Ijin Lingkungan $\frac{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki Dokumen Lingkungan dan Ijin Lingkungan}}{\text{Jumlah Perusahaan yang ada}} \times 100\%$	100%	
2	Persentase Jumlah Usaha Berpotensi menjadi Sumber Pencemaran	Untuk mengukur Jumlah Usaha Berpotensi menjadi Sumber Pencemaran $\frac{\text{Jumlah Usaha Berpotensi menjadi Sumber Pencemaran}}{\text{Jumlah perusahaan yang ada}} \times 100\%$	100%	
3	Persentase Pengelolaan RTH	Untuk Mengukur Pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) $\frac{\text{jumlah Ruang terbuka hijau yang dikelola}}{\text{jumlah Ruang terbuka hijau yang ada}} \times 100\%$	100%	
4	Persentase Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Untuk mengukur Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat $\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduanyang masuk}} \times 100\%$	100%	
5	Persentase Peningkatan SDM Lingkungan guna Mendukung Penguatan Kelembagaan	Untuk mengukur Jumlah SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang lingkungan hidup $\frac{\text{Jumlah Pegawai yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang lingkungan hidup}}{\text{Jumlah seluruh pegawai}} \times 100\%$	100%	
4. URUSAN: PEKERJAAN UMUM				
1.	Persentase panjang jalan yang kondisinya baik	Untuk mengukur panjang jalan yang kondisinya baik terhadap seluruh panjang jalan di Wilayah Kabupaten $\frac{\text{Panjang jalan yang baik tahun ybs}}{\text{Panjang jalan Kabupaten yang ada}} \times 100\%$	100%	
2.	Persentase peningkatan jembatan yang kondisinya baik	Untuk mengukur jumlah jembatan yang kondisinya baik terhadap seluruh jembatan yang ada di Wilayah Kabupaten $\frac{\text{Jumlah jembatan yang kondisinya baik tahun ybs}}{\text{Jumlah jembatan yang ada}} \times 100\%$	100%	
3.	Persentase peningkatan prasarana gedung kantor	Untuk mengukur pemenuhan kebutuhan gedung kantor Pem. Kabupaten sampai Tahun N $\frac{\text{Jumlah prasarana gedung kantor yang tersedia}}{\text{Jumlah prasarana gedung kantor tahun ybs}} \times 100\%$	100%	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FAKTOR PENGALI	KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	RUMUSAN OPERASIONAL		
4.	Persentase peningkatan saluran drainase yang berfungsi baik	Untuk mengukur panjang drainase yang kondisinya baik terhadap seluruh drainase yang ada di Wilayah Kabupaten <i>Panjang saluran drainase yang berfungsi s.d tahun vbs</i> <i>Panjang saluran drainase yang berfungsi s.d tahun dasar</i>	100%	
5.	Cakupan pemenuhan jaringan irigasi	Untuk mengukur panjang irigasi yang ada terhadap kebutuhan jaringan irigasi yang dibutuhkan dalam periode (RPJM) tertentu di Wilayah Kabupaten. <i>Panjang jaringan irigasi yang tersedia</i> <i>Panjang jaringan irigasi yang dibutuhkan</i>	100%	
6.	Persentase penurunan tingkat kerusakan sarana dan prasarana bidang pengairan	Untuk mengukur panjang irigasi yang kondisinya rusak dari seluruh irigasi yang ada di Wilayah Kabupaten <i>Jumlah jaringan irigasi primer/sekunder yang rusak</i> <i>Jumlah jaringan irigasi primer/sekunder yang ada</i>	100%	
7.	Persentase luas area genangan di wilayah pertanian yang rawan banjir	Untuk mengukur luasan area yang tergenang banjir di daerah pertanian yang rawan terkena banjir. <i>Luas area genangan di wilayah pertanian rawan banjir</i> <i>Luas area pertanian yang rawan banjir</i>	100%	
5. URUSAN: PENATAAN RUANG				
1.	Persentase Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten ota (RDTRK/RTRK) yang disusun dibandingkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Untuk mengukur cakupan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah disusun rencana detailnya (DED) <i>RDTRK/DED yang disusun</i> <i>RDTRK/DED Kecamatan yang seharusnya disusun</i>	100%	
2.	Persentase penerapan pemanfaatan tata ruang yang tidak sesuai dengan Dokumen Tata Ruang	Untuk mengukur konsistensi dan penegakan peraturan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap Dokumen Tata Ruang Wilayah yang dihitung berdasarkan pemanfaatan Blok/Area berdasarkan peruntukannya <i>Jumlah blok/luasan Tata Ruang yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya</i> <i>Jumlah blok/luasan dalam Tata Ruang</i>	100%	
2.	Persentase peningkatan bangunan yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	Untuk mengukur ketaatan masyarakat terhadap Dokumen Tata Ruang Wilayah terutama dalam mendirikan bangunan <i>Jumlah bangunan ber - IMB</i> <i>Jumlah bangunan yang seharusnya ber - IMB</i>	100%	
6. URUSAN: PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
1.	Persentase keterpaduan perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten	Untuk mengukur keselarasan sasaran, program pembangunan kerangka nasional antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten <i>Jumlah sasaran, program RPJMN, RPJMD Prov. yang termuat dalam RPJMD Kabupaten</i> <i>Jumlah sasaran, program dalam RPJMD Kabupaten</i> <i>Jumlah sasaran, program RKP, RKPD Prov. yang termuat dalam RKPD Kabupaten</i> <i>Jumlah sasaran, program dalam RPJMD Kabupaten</i>	100%	
			100%	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FAKTOR PENGALI	KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	RUMUSAN OPERASIONAL		
2.	Persentase produk perencanaan Kabupaten bersifat wajib yang disusun dan ditetapkan tepat waktu setiap tahun	Untuk mengukur ketepatan waktu pembuatan produk perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	
		$\frac{\text{Produk perencanaan Kabupaten bersifat wajib yang disusun dan ditetapkan tepat waktu Tahun X}}{\text{Produk perencanaan Kabupaten yang wajib disusun Tahun X}}$		
3.	Persentase produk Laporan Kinerja Pembangunan, Kabupaten bersifat wajib yang disusun dan dikirim tepat waktu setiap tahun	Untuk mengukur ketepatan waktu pembuatan laporan pembangunan, kinerja, penyelenggaraan pembangunan kepada pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat yang tepat waktu	100%	
		$\frac{\text{Produk Laporan Kabupaten bersifat wajib yang disusun dan dikirimkan tepat waktu Tahun n}}{\text{Produk Produk Laporan Kabupaten yang wajib disusun dan dilaporkan ke Pemerintah Prov, Pusat pada Tahun n}}$		
4.	% kegiatan yang mendasarkan Standar Satuan Harga (SSH)	Untuk mengukur kegiatan yang mendasarkan kepada Harga Satuan Pelaksanaan Kegiatan	100%	
		$\frac{\text{Jml kegiatan yang mendasarkan pada SSH}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan dalam APBD}}$		
5.	Persentase SKPD yang memiliki IKU	Untuk mengukur rasio SKPD yang telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap seluruh SKPD di Kabupaten.	100%	
		$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki IKU}}{\text{Jumlah SKPD yang ada}}$		
7. URUSAN: PERUMAHAN				
1.	Persentase rumah layak huni	Untuk jumlah warga (Rumah Tangga) yang memiliki rumah layak huni	100%	
		$\frac{\text{Jumlah RT yang mempunyai rumah layak huni}}{\text{jumlah Rumah Tangga}}$		
2.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik	Untuk mengukur jumlah rumah tangga yang dilengkapi dengan listrik	100%	
		$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik}}{\text{Jumlah rumah}}$		
8. URUSAN: KEPEMUDAAN DA OLAH RAGA				
1	Pemuda yang berprestasi pada berbagai bidang di tingkat nasional	Untuk mengukur Peran pemuda yang berprestasi pada berbagai bidang di tingkat nasional	100%	
		$\frac{\text{jumlah pemuda yang berprestasi pada berbagai bidang di tingkat nasional}}{\text{jumlah pemuda yang berprestasi pada berbagai bidang di tingkat nasional}}$		
2	Jumlah cabang olah raga yang berprestasi	Untuk mengukur cabang olah raga yang berprestasi yang di bina oleh Pemerintah Kabupaten	100%	
		$\frac{\text{cabang olah raga yang berprestasi}}{\text{Jumlah Cabang Olahraga yang ada di bina di Kabupaten}}$		
3.	Meningkatnya Jumlah wirausahawan muda	Untuk mengukur jumlah wirausahaan golongan muda	100%	
		$\frac{\text{jumlah wirausahawan muda}}{\text{Jumlah wirausahawan yang terdaftar dalam Ikatan Pengusaha}}$		

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FAKTOR PENGALI	KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	RUMUSAN OPERASIONAL		
9. URUSAN: PENANAMAN MODAL				
1	Jumlah investasi PMA di daerah	Untuk mengukur Persentase peningkatan PMA di daerah $\frac{\text{jumlah investasi PMA th ini (N)}}{\text{Jumlah investasi PMA th lalu (N -1)}}$	100%	
2	Jumlah realisasi PMDN	Untuk mengukur Persentase peningkatan PMDN di daerah $\frac{\text{jumlah investasi PMDN th ini (N)}}{\text{Jumlah investasi PMDN th lalu (N -1)}}$	100%	
3	Jumlah realisasi investasi lokal	Untuk Mengukur Persentase peningkatan investasi lokal $\frac{\text{jumlah investasi lokal th ini (N)}}{\text{Jumlah investasi lokal th lalu (N -1)}}$	100%	
10. URUSAN: KOPERASI DAN UKM				
1	Persentase peningkatan koperasi yang mendapatkan penilaian baik	Untuk mengukur Persentase peningkatan koperasi yang mendapatkan penilaian baik $\frac{\text{koperasi yang mendapatkan penilaian baik}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}}$	100%	
2	Persentase UMKM tangguh dan UMKM mandiri	Untuk mengukur Persentase UMKM tangguh dan UMKM mandiri $\frac{\text{Jumlah UMKM tangguh dan UMKM mandiri}}{\text{Jumlah UMKM yang ada}}$	100%	
3	Persentase peningkatan PKL yang tertata	Untuk Mengukur Persentase peningkatan PKL yang tertata $\frac{\text{PKL yang tertata}}{\text{Seluruh PKL yang ada}}$	100%	
11. URUSAN: KEPENDUDUKKAN DAN CATATAN SIPIL				
1.	Persentase KTP yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan	Untuk mengukur ketepatan waktu pengurusan KTP sejak pengajuan sampai diterbitkan (dengan syarat dokumen usulan telah lengkap) $\frac{\text{Jumlah KTP yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan}}{\text{Jumlah seluruh KTP yang diselesaikan dalam th ybs}}$	100%	Kependudukan dan Catatan Sipil
2.	Persentase Akte kelahiran yang diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari	Untuk mengukur ketepatan waktu pengurusan Akte Kelahiran sejak pengajuan sampai diterbitkan (dengan syarat dokumen usulan telah lengkap) $\frac{\text{Jumlah akte kelahiran yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan}}{\text{jumlah seluruh akte kelahiran dlm th ybs}}$	100%	
3.	Persentase penduduk ber KTP dan ber Akte	Untuk mengukur rasio penduduk yang mempunyai Akte Kelahiran dan KTP terhadap seluruh penduduk di Kabupaten. $\frac{\text{Jumlah penduduk ber Akte Kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk yang wajib ber Akte Kelahiran}}$ $\frac{\text{Jumlah penduduk ber KTP}}{\text{Jumlah penduduk yang wajib ber KTP}}$	100%	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FAKTOR PENGALI	KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	RUMUSAN OPERASIONAL		
12. URUSAN: KETENAGAKERJAAN				
1.	Persentase tenaga kerja yang ikut Jamsostek	Untuk mengukur persentase tenaga kerja yang ikut Jamsostek $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang ikut Jamsostek}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang ada}}$	100%	
2.	Persentase perusahaan yang menerapkan Upah Minimum Kabupaten	untuk mengukur tingkat ketaatan perusahaan dalam menerapkan Upah Minimum Kabupaten $\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan UMK}}{\text{Jumlah perusahaan yang seharusnya menerapkan UMK}}$	100%	
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Untuk mengukur tingkat partisipasi (pengangguran) dari usia kerja/angkatan kerja $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang bekerja}}{\text{Jumlah angkatan tenaga kerja}}$	100%	
4.	Persentase Tenaga Kerja (TKI) ke luar negeri	Untuk mengukur perbandingan jumlah tenaga kerja yang bekerja di LN terhadap total Tenaga Kerja di Pem Kab. $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang bekerja di LN}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang bekerja Pem Kab.}}$	100%	
5.	Persentase kecelakaan kerja	Untuk mengukur angka kecelakaan kerja dari tahun ke tahun $\frac{(\text{Poin})/\text{angka kecelakaan kerja th } n}{\dots}$		
6.	Persentase sengketa kasus tenaga kerja yang dapat diselesaikan	Untuk mengukur kasus tenaga kerja dan tingkat penyelesaiannya $\frac{\text{Jml sengketa kasus tenaga kerja yg dpt diselesaikan th ybs}}{\text{Jumlah sengketa kasus tenaga kerja yg di laporkan th ybs}}$	100%	
13. URUSAN: KETAHANAN PANGAN				
1.	Persentase ketersediaan bahan pangan	untuk mengukur ketersediaan bahan pangan yang ada dalam jangka waktu tertentu di kemudian hari $\frac{\text{Jml bahan pangan tersedia (waktu tertentu)}}{\text{Jml kebutuhan bahan pangan (waktu tertentu)}}$	100%	
2.	Tingkat kenaikan harga sembako di hari-hari besar	untuk mengukur rata-rata harga bahan pokok di hari-hari besar (lebaran) dibandingka hari-hari biasa $\frac{\text{Harga-rata-rata sembako pada hari besar-harga rata-rata pada hari biasa}}{\text{Harga-rata-rata sembako pada hari-hari biasa}}$	100%	
14. URUSAN: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Untuk mengetahui Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta $\frac{\text{Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta}}{\text{Jumlah perempuan angkatan kerja}}$	100%	
2	Jumlah kasus kekerasan di dalam rumah tangga	Untuk mengetahui jumlah kasus kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) $\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan di dalam rumah tangga}}{\text{Jumlah seluruh kasus kekerasan}}$	100%	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FAKTOR PENGALI	KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	RUMUSAN OPERASIONAL		
3	Jumlah anak dan perempuan korban tindak kekerasan yang memperoleh layanan advokasi	Untuk mengetahui Jumlah anak dan perempuan korban tindak kekerasan yang memperoleh layanan advokasi <i>Jumlah anak dan perempuan korban tindak kekerasan yang memperoleh layanan advokasi</i> <i>Jumlah seluruh kasus anak dan perempuan korban tindak kekerasan</i>	100%	
15. URUSAN: KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA				
1	Prevalensi kesertaan KB	Untuk mengetahui tingkat kesertaan KB <i>Jumlah peserta KB aktif</i> <i>Jumlah pasangan usia subur (PUS)</i>	100%	
2	Persentase peserta KB baru	Untuk mengetahui Persentase peserta KB baru <i>Jumlah peserta KB baru</i> <i>Jumlah pasangan usia subur (PUS)</i>	100%	
3	Persentase perkawinan di bawah umur	Untuk mengetahui jumlah perkawinan di bawah umur <i>Jumlah perkawinan di bawah umur</i> <i>Jumlah seluruh perkawinan</i>	100%	
4	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Untuk mengetahui rata-rata anak dalam keluarga <i>Jumlah seluruh anak</i> <i>Jumlah seluruh keluarga</i>	100%	
5	Proporsi keluarga sejahtera dan keluarga sejahtera I	Untuk mengetahui Proporsi keluarga sejahtera dan keluarga sejahtera I <i>Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I</i> <i>Jumlah seluruh keluarga</i>	100%	
6	Persentase kelompok bina ketahanan keluarga	Untuk mengetahui Persentase kelompok bina ketahanan keluarga <i>Jumlah keluarga yang tergabung dalam bina ketahanan keluarga</i> <i>Jumlah seluruh keluarga</i>	100%	
7	Persentase kelompok UPPKS	Untuk mengetahui Persentase kelompok UPPKS (usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera) <i>Jumlah keluarga yang tergabung dalam kelompok UPPKS</i> <i>Jumlah seluruh keluarga</i>	100%	
16. URUSAN: PERHUBUNGAN				
1	Jumlah Ijin Trayek	Untuk mengetahui jumlah angkutan umum yang memiliki ijin trayek <i>Jumlah angkutan umum yang memiliki ijin trayek</i> <i>Jumlah seluruh angkutan umum</i>	100%	
2	Jumlah Ijin KIR	Untuk mengetahui jumlah angkutan umum yang memiliki ijin KIR <i>Jumlah angkutan umum yang memiliki ijin KIR</i> <i>Jumlah seluruh angkutan umum</i>	100%	
3	Jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas	Untuk mengetahui jumlah ruas jalan yang seharusnya dilengkapi dengan rambu lalu lintas <i>Jumlah ruas jalan yang di pasang rambu lalu lintas</i> <i>Jumlah seluruh ruas jalan yang seharusnya di pasang rambu lalu lintas</i>	100%	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FAKTOR PENGALI	KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	RUMUSAN OPERASIONAL		
17. URUSAN: KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Persentase layanan publik yang menggunakan Teknologi Informasi (TI)	Untuk mengukur layanan kepada masyarakat diseluruh SKPD pelayanan yang telah menggunakan IT (Aplikasi berbasis komputer) dalam pelayanan kepada masyarakat <i>Jumlah layanan public yang menggunakan teknologi informasi (TI)</i> <i>Jumlah layanan kepada masyarakat yang diselenggarakan SKPD</i>	x100%	
18. URUSAN: PERTANAHAN				
	TIDAK ADA - MASIH DI PUSAT (BPN)			
19. URUSAN: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				
1	Persentase aspirasi yang ditindak lanjuti	Untuk mengetahui Persentase aspirasi yang di tindaklanjuti <i>Jumlah aspirasi yang ditindak lanjuti</i> <i>Jumlah seluruh aspirasi yang masuk</i>	100%	
2	Persentase organisasi yang mendapatkan ijin mendirikan ormas	Adalah untuk mengetahui jumlah organisasi yang mendapatkan ijin mendirikan ormas/orpol/pemuda <i>Jumlah seluruh ormas yang mendapatkan ijin</i> <i>Jumlah seluruh ormas yang ada</i>	100%	
3	Jumlah pembinaan terhadap masyarakat, LSM, ORMAS	Adalah untuk mengetahui jumlah organisasi yang mendapatkan pembinaan <i>Jumlah seluruh ormas yang mendapatkan pembinaan</i> <i>Jumlah seluruh ormas yang ada</i>	100%	
4	Persentase organisasi masyarakat orpol, pemuda, organisasi kemasyarakatan yang dibina	Adalah untuk jumlah organisasi masyarakat, orpol, organisasi pemuda dan kemasyarakatan yang dibina oleh pemkab terhadap semua organisasi yang ada tersebut <i>Jumlah organisasi yang dibina</i> <i>Jumlah organisasi yang ada masyarakat yang ada</i>	100%	
20. URUSAN: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				
1	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tata kearsipan yang baik	Untuk mengukur jumlah SKPD diseluruh Kabupaten yang telah mampu melakukan Tata Kelola Kearsipan dengan baik <i>Jml SKPD yang memiliki tata kearsipan baik</i> <i>Jumlah SKPD yang ada</i>	100%	Bagian Pemerintahan
2	Persentase SKPD yang memiliki Renstra dengan baik	Untuk mengukur jumlah SKPD diseluruh Kabupaten yang telah mampu membuat dokumen Renstra dengan baik secara mutu, tepat waktu dan sesuai dengan Pedoman yang berlaku <i>Jumlah SKPD yang memiliki Renstra dengan baik</i> <i>Jumlah SKPD yang ada</i>	100%	Bagian Organisasi
3	Persentase SKPD yang menyusun LAKIP tepat waktu	Untuk mengukur jumlah SKPD diseluruh Kabupaten yang telah mampu membuat dokumen Renstra dengan baik secara mutu, tepat waktu dan sesuai dengan Pedoman yang berlaku <i>Jumlah SKPD yang menyusun LAKIP tepat waktu</i> <i>Jumlah SKPD yang ada</i>	100%	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FAKTOR PENGALI	KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	RUMUSAN OPERASIONAL		
5	Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi inventaris daerah dg baik	Untuk mengukur SKPD yang telah menyelenggarakan administrasi terhadap inventaris/aset dengan baik	100%	DPPKA
		$\frac{\text{Jumlah SKPD yang melaksanakan administrasi dengan baik}}{\text{Jumlah SKPD}}$		
6	Persentase Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten	Untuk jumlah Aset yang dimiliki oleh Pemkab yang dilindungi oleh dokumen kepemilikan	100%	DPPKA
		$\frac{\text{Jumlah tanah yang bersertifikat}}{\text{Jumlah tanah yang ada}}$		
7	Persentase RT/RW yang diberi bantuan operasional	Untuk jumlah Aset yang dimiliki oleh Pemkab yang dilindungi oleh dokumen kepemilikan	100%	
		$\frac{\text{Jumlah RT/RW yang dibantu tahun ini}}{\text{Jumlah RT/RW yang ada di Kota Kediri}}$		
8	Persentase Ketepatan waktu penerbitan SP2D	Untuk mengukur jumlah SP2D yang diterbitkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam peraturan	100%	DPPKA
		$\frac{\text{Jumlah SP2D yang terbit tepat waktu}}{\text{Jumlah SP2D yang diterbitkan}}$		
9	Persentase waktu rata-rata penerbitan SP2D	Untuk mengukur rata-rata waktu yang diperlukan dalam penerbitan SP2D dalam kurun waktu tertentu, dihitung dari rata-rata waktu yang terjadi di setiap SKPD	100%	DPPKA
		$\frac{\text{Jmlh rata-rata waktu yg diperlukan menerbitkan SP2D di setiap SKPD dlm satuan waktu}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}}$		
10	Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan oleh SKPD	Untuk mengukur ketepatan waktu SKPD dalam menyampaikan Laporan Keuangan (semester dan tahunan) kepada unit kerja yang melakukan konsolidasi	100%	DPPKA
		$\frac{\text{Jumlah dokumen & laporan keuangan tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen & laporan keuangan yang diterbitkan}}$		
15	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan (struktural, diklat PIM)	Untuk mengukur kompetensi pegawai yang menduduki jabatan dengan melihat jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat Pim	100%	BKD
		$\frac{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti diklat struktural (Diklat Pim)}}{\text{Jumlah pegawai yang seharusnya mengikuti diklat}}$		
16	Jumlah penyelenggaraan pendidikan dan latihan (struktural, fungsional, teknis)	Untuk mengukur tingkat realisasi pelaksanaan Diklat terhadap Rencana penyelenggaraan Diklat dalam 1 Tahun	100%	BKD
		$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan diklat struktural th ybs}}{\text{Jumlah penyelenggaraan diklat struktural seharusnya dalam Dok. Perencanaan}}$		
		$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan diklat fungsional th ybs}}{\text{Jumlah penyelenggaraan diklat fungsional seharusnya dalam Dok. Perencanaan}}$	100%	
		$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan diklat teknis th ybs}}{\text{Jumlah penyelenggaraan diklat teknis seharusnya dalam Dok. Perencanaan}}$	100%	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FAKTOR PENGALI	KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	RUMUSAN OPERASIONAL		
		<i>Jumlah pegawai yang dikirim utk diklat struktural th ybs</i> <i>Jumlah yang seharusnya dikirim utk mengikuti diklat struktural</i>	100%	
		<i>Jumlah pegawai yang dikirim utk diklat prajabatan th ybs</i> <i>Jumlah yang seharusnya dikirim utk mengikuti diklat prajabatan</i>	100%	
17	Persentase Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Untuk mengukur ketepatan waktu pengurusan dokumen kepegawaian yang diterbitkan seperti kenaikan pangkat, promosi, dan mutasi.		BKD
		<i>Jumlah dokumen kepegawaian yang terbit tepat waktu</i> <i>Jumlah seluruh dokumen kepegawaian yang diterbitkan</i>	100%	
18	Ketepatan waktu penyelesaian IMB	Untuk mengukur ketepatan waktu pengurusan IMB sejak pengajuan sampai diterbitkan (dengan syarat dokumen usulan telah lengkap)		KPPT
		<i>Jumlah penyelesaian IMB yang tepat waktu</i> <i>Jumlah IMB yang diterbitkan</i>	100%	
19	Ketepatan waktu penyelesaian Ijin Usaha	Untuk mengukur ketepatan waktu pengurusan Ijin Usaha sejak pengajuan sampai diterbitkan (dengan syarat dokumen usulan telah lengkap)		KPPT
		<i>Jumlah penyelesaian Ijin Usaha yang tepat waktu</i> <i>Jumlah Ijin Usaha yang diterbitkan</i>	100%	
20	Persentase raperda yang diselesaikan menjadi Perda dalam setahun	Untuk mengukur jumlah Rancangan Perda yang di usulkan dalam tahun yang bersangkutan dan diproses menjadi Perda pada Tahun yang bersangkutan		Bag Hukum
		<i>Jumlah Raperda yang diselesaikan menjadi Perda</i> <i>Jumlah Raperda yang diusulkan</i>	100%	
21	Persentase Perda yang diselesaikan tepat waktu	Untuk mengukur ketepatan waktu penyelesaian Raperda sampai di tetapkan menjadi Perda		Bag Hukum
		<i>Jumlah raperda yang menjadi Perda tepat waktu</i> <i>Jumlah Perda yang diterbitkan</i>	100%	
22	Persentase kegiatan DPRD yang dapat dilaksanakan	Untuk mengukur kemampuan DPRD melaksanakan agenda, rencana kerja yang telah direncanakan dalam 1 tahun		Sekwan
		<i>Jml kegiatan DPRD pada th ybs</i> <i>Jml agenda kegiatan DPRD pada th ybs</i>	100%	
21. URUSAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1	Persentase jalan desa yang kondisinya baik	Untuk mengetahui jumlah ruas jalan desa yang kondisinya baik terhadap ruas jalan desa yang ada		
		<i>Jumlah ruas jalan yang kondisinya baik</i> <i>Jumlah seluruh ruas jalan desa</i>	100%	
2	Cakupan Jaringan Listrik Pedesaan	Untuk mengetahui jumlah desa yang sudah mendapatkan fasilitas jaringan listrik pedesaan		
		<i>Jumlah desa yang mendapatkan fasilitas jaringan listrik</i> <i>Jumlah seluruh desa</i>	100%	
3	Persentase Rumah tidak layak huni yang dibangun secara swadaya dan swakarsa	Untuk mengetahui Persentase Rumah tidak layak huni yang dibangun secara swadaya dan swakarsa		
		<i>Jumlah Rumah layak huni yang dibangun secara swadaya dan swakarsa</i> <i>Jumlah rumah tidak layak huni</i>	100%	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FAKTOR PENGALI	KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	RUMUSAN OPERASIONAL		
22. URUSAN: SOSIAL				
1	Persentase jumlah PMKS (Penyandang masalah kesejahteraan sosial) yang dibantu dan ditangani	Untuk mengetahui jumlah PMKS (Penyandang masalah kesejahteraan sosial) yang dibantu dan ditangani <i>Jumlah PMKS yang sudah dibantu dan ditangani</i> <i>Jumlah seluruh PMKS</i>	100%	
2	Jumlah rumah tangga miskin	Untuk mengetahui jumlah masyarakat miskin <i>Jumlah masyarakat miskin</i> <i>Jumlah seluruh masyarakat</i>	100%	
3	Persentase jumlah penyandang cacat yang mendapat penanganan	Untuk mengetahui jumlah penyandang cacat yang mendapat penanganan <i>Jumlah penyandang cacat yang mendapat penanganan</i> <i>Jumlah seluruh penyandang cacat</i>	100%	
4	Jumlah anak putus sekolah yang mendapat penanganan	Untuk mengetahui jumlah anak putus sekolah yang mendapat penanganan <i>Jumlah anak putus sekolah yang mendapat penanganan</i> <i>Jumlah seluruh putus sekolah</i>	100%	
5	Pemberdayaan USILA (Usia lanjut)	Untuk mengetahui jumlah USILA yang sudah ditangani dan diberdayakan <i>Jumlah USILA yang sudah ditangani (jumlah kumulatif n+(n-1))</i> <i>Jumlah seluruh USILA</i>	100%	
23. URUSAN: KEBUDAYAAN				
1.	Prosentase warisan tradisi yang terawat	Untuk mengukur warisan tradisi yang dipelihara oleh masyarakat atau Pemkab terhadap seluruh warisan tradisi budaya yang ada. <i>Jumlah warisan tradisi yang terawat</i> <i>Jumlah warisan tradisi yang ada</i>	100%	
2.	Persentase event budaya berskala nasional dan internasional yang di ikuti	Untuk mengukur keterlibatan daerah terhadap event budaya yang bersifat nasional maupun internasional dalam event yang di ikuti <i>Event budaya berskala nasional dan internasional yang di ikuti</i> <i>Event budaya yang di ikuti Kab. Pamekasan</i>	100%	
3.	Persentase budaya lokal yang dipromosikan dari budaya lokal yang dimiliki	Untuk mengukur keterlibatan daerah terhadap event budaya yang bersifat nasional maupun internasional dalam event yang di ikuti <i>Event budaya berskala nasional dan internasional yang di ikuti</i> <i>Event budaya yang di ikuti Kab. Pamekasan</i>	100%	
4.	Persentase budaya lokal yang di bina dari budaya lokal yang dimiliki	Untuk mengukur peran serta Pemerintah Kabupaten dalam membina budaya lokal yang dimiliki <i>Budaya lokal yang di bina Pemerintah Kabupaten</i> <i>Budaya lokal yang ada</i>	100%	
24. URUSAN: STATISTIK				
	URUSAN STATISTIK MASIH KERJASAMA DENGAN BPS			

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FAKTOR PENGALI	KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	RUMUSAN OPERASIONAL		
25. URUSAN: KEARSIPAN				
1.	Persentase arsip-arsip penting di SKPD yang di akusisi dan dikelola Kantor Arsip	Untuk mengukur tingkat kataatan SKPD untuk mengirimkan arsip penting ke Kantor Arsip, di ukur dengan persentase SKPD yang taat mengirimkan arsip. <i>Jumlah SKPD yang taat mengirimkan arsip</i> <i>Jumlah SKPD yang mempunyai arsip penting.</i>	100%	
2.	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tata kearsipan yang baik	Untuk mengukur jumlah SKPD diseluruh Kabupaten yang telah mampu melakukan Tata Kelola Kearsipan dengan baik <i>Jml SKPD yang memiliki tata kearsipan baik</i> <i>Jumlah SKPD yang ada</i>	100%	
3.	Persentase Arsip penting yang kondisinya baik dan terawat	Untuk mengukur jumlah arsip yang dikelola dan kondisinya baik <i>Jumlah arsip yang kondisinya baik</i> <i>Jumlah arsip yang ada</i>	100%	
26. URUSAN: PERPUSTAKAAN				
1.	Persentase peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan	untuk mengukur kunjungan masyarakat ke perpustakaan baik Perpustakaan milik Pem Kab maupun Perpustakaan Swasta <i>Jumlah kunjungan ke perpustakaan TH ini - Tahun lalu</i> <i>Jumlah kunjungan ke perpustakaan Tahun lalu</i>	100%	
2.	Persentase peningkatan jumlah dan judul buku perpustakaan	untuk mengukur penambahan jumlah buku baik dari sisi judul maupun kuantitas <i>Jumlah buku yang tersedia TH ini - Tahun lalu</i> <i>Jumlah buku yang tersedia Tahun lalu</i>	100%	
3.	Persentase peningkatan kunjungan Mobil Perpustakaan Keliling	untuk mengukur jumlah kunjungan Mobil Perpustakaan keliling <i>Jumlah kunjungan Mobil Perpustakaan Keliling Tahun ini - Tahun lalu</i> <i>Jumlah buku Mobil Perpustakaan Keliling yang tersedia tahun lalu</i>	100%	

URUSAN PILIHAN

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FAKTOR PENGALI	KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	RUMUSAN OPERASIONAL		
1. URUSAN: KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1.	Persentase peningkatan Produksi Ikan	untuk mengukur tingkat produksi ikan dari tahun-ke tahun $\frac{\text{Jml produksi ikan THN } n - \text{THN } n-1}{\text{Jumlah produksi ikan tahun } n}$	100%	
2.	Meningkatnya masyarakat yg melakukan budidaya ikan	untuk mengukur tingkat produksi ikan budidaya terhadap total produksi ikan $\frac{\text{Jml produksi ikan buddaya}}{\text{Jumlah produksi ikan}}$	100%	
3	Persentase sumbangan PDRB dari sektor Kelautan dan Perikanan terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Pmksn.	untuk mengukur tingkat sumbangan PDRB Kabupaten dari sektor Kelautan dan Perikanan $\frac{\text{PDRB sektor Kelautan dan Perikanan}}{\text{Total PDRB}}$	100%	
2. URUSAN: PERTANIAN				
1	Persentase sumbangan PDRB dari sektor Pertanian terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Pmksn.	untuk mengukur tingkat sumbangan PDRB Kabupaten dari sektor pertanian $\frac{\text{PDRB sektor Pertanian}}{\text{Total PDRB}}$	100%	
2	Persentase produksi tanaman pangan dan hortikultura untuk mengembangkan agribisnis	Untuk mengukur tingkat produksi tanaman pangan dan hortikultura $\frac{\text{Jml produksi hasil tanaman pangan dan hortikultura Th ybs}}{\text{Jml produksi hasil tanaman pangan dan hortikultura Th dasar}}$	100%	
3. URUSAN: KEHUTANAN				
1.	Persentase Penutupan lahan kritis yang direboisasi	untuk mengukur lahan kritis yang direboisasi terhadap seluruh areal lahan kritis $\frac{\text{Jumlah areal Penutupan lahan kritis yang direboisasi}}{\text{Jml total Lahanyang kondisinya kritis}}$	100%	
2.	Persentase produksi tanaman perkebunan	Untuk mengukur tingkat produksi tanaman perkebunan $\frac{\text{Jml produksi hasil tanaman perkebunan Th ybs}}{\text{Jml produksi hasil tanaman perkebunan Th dasar}}$	100%	
3	Persentase sumbangan PDRB dari sektor Kehutanan terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Pmksn.	untuk mengukur tingkat sumbangan PDRB Kabupaten dari sektor Kehutanan $\frac{\text{PDRB sektor Kehutanan}}{\text{Total PDRB}}$	100%	
4. URUSAN: ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL				
	TIDAK ADA PENETAPAN IKU			

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FAKTOR PENGALI	KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	RUMUSAN OPERASIONAL		
5. URUSAN: PARIWISATA				
1	Prosentase jumlah kunjungan wisata	Adalah untuk mengetahui prosentase jumlah kunjungan wisata (n = tahun berjalan) $\frac{\text{Jumlah kunjungan wisata (n)}}{\text{Jumlah kunjungan wisata (n-1)}}$	100%	Pariwisata
2	Prosentase jumlah tempat wisata yang terpelihara	Untuk mengetahui jumlah tempat wisata yang terpelihara sarana dan prasarananya $\frac{\text{jumlah tempat wisata yang terpelihara}}{\text{Jumlah seluruh tempat wisata}}$	100%	Pariwisata
3	Prosentase jumlah peminat seni budaya kacong-cebbing pamekasan	Untuk jumlah peminat seni budaya kacong-cebbing pamekasan $\frac{\text{Jumlah peminat tahun berjalan (n)}}{\text{Jumlah peminat tahun sebelumnya (n-1)}}$	100%	Perekonomian
4	Persentase sumbangan PDRB dari sektor Pariwisata terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Pmksn.	untuk mengukur tingkat sumbangan PDRB Kabupaten dari sektor Pariwisata $\frac{\text{PDRB sektor Pariwisata}}{\text{Total PDRB}}$	100%	
6. URUSAN: INDUSTRI				
1	Jumlah Industri (usaha Mikro atau Menengah) yang dibina	Adalah untuk mengetahui jumlah industri (Mikro atau Menengah) yang dibina terhadap seluruh Industri Mikro dan Menengah yang ada di Kabupaten $\frac{\text{Jumlah Industri yang sudah (Mikro atau Menengah) yang di bina}}{\text{Jumlah seluruh Industri (Mikro atau Menengah) yang ada}}$	100%	
2	Jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industri	Adalah untuk mengetahui Jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industri $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industri}}{\text{Jumlah seluruh tenaga kerja}}$	100%	
3	Persentase sumbangan PDRB dari sektor Industri terhadap seluruh PDRB di Kabupaten Pmksn.	untuk mengukur tingkat sumbangan PDRB Kabupaten dari sektor Industri $\frac{\text{PDRB sektor Industri}}{\text{Total PDRB}}$	100%	
7. URUSAN: PERDAGANGAN				
1	Produk makanan dan minuman yang sudah berijin dan bertabel halal yang beredar di Kabupaten	Adalah untuk memantau produk makanan dan minuman yang sudah berijin dan bertabel halal yang beredar di pasaran $\frac{\text{Jumlah produk makanan dan minuman yang sudah berijin dan bertabel halal}}{\text{Jumlah seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di pasaran}}$	100%	
2	Promosi produk unggulan daerah	Untuk mengetahui jumlah produk unggulan yang sudah dipromosikan $\frac{\text{Jumlah produk unggulan yang sudah dipromosikan}}{\text{Jumlah seluruh produk unggulan}}$	100%	
3	Cakupan bina kelompok pengrajin	Untuk mengetahui jumlah pengrajin yang sudah di bina dalam bina kelompok $\frac{\text{Jumlah pengrajin yang di bina dalam bina kelompok}}{\text{Jumlah seluruh pengrajin}}$	100%	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FAKTOR PENGALI	KETERANGAN
	URAIAN INDIKATOR	RUMUSAN OPERASIONAL		
8. URUSAN: KETRANSMIGRASIAN				
1	Persentase transmigrasi yang diberangkatkan	Adalah untuk mengetahui jumlah transmigrasi yang diberangkatkan terhadap penduduk yang mendaftar prigram transmigrasi dalam tahun yang bersangkutan		
		$\frac{\text{Jumlah transmigran yang diberangkatkan Tahun } n}{\text{Jumlah transmigran yang mendaftar Tahun } n}$	100%	

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII